



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

**RENCANA
KERJA** | **2022**

Jalan Poros 2 Jalur depan kantor Bupati
Kecamatan Sangir
Telp/Fax (0755) 7575124



DAFTAR ISI

Daftar isi	i
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKPSDM 2016-2021	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III	
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM	36
BAB IV	41
BAB V	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun Pertama Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 – 2025 belum merujuk pada penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun 2021. Selanjutnya dari Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 -2025 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya di sebut Renja, mempunyai Fungsi penting dalam Suatu system perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat :

1. Rancangan awal Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansional harus menerjemahkan visi, misi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi Sesuai arahan operasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Awal Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan Program kegiatan kedalam Rancangan KUA, PPAS, dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana kerja dan Anggran (RKA) Tahun 2022.
3. Rancangan Awal Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk Evaluasi pelaksanaan Program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Perangkat Daerah.

Mengingat arti Stategis dokumen rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan Tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

Perangkat Daerah harus mengikuti tata Cara dalam Alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah serta merujuk pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja pembangunan Daerah Tahun 2022 antara lain disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada kodefikasi dan nomenklatur Permendagri nomor 90 Tahun 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Tas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas PP No. 7 Tahun 1997 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) Sebagai Mana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentan perubahan atas PP No. 41 Tahun 2017 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031.

17. Renstra BKN RI Tahun 2015-2019
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang RKPD Tahun 2019.
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja BKPSDM 2022 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran 2022;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKPSDM dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKPSDM.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM 2022 adalah terjabarkannya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDM pada tahun anggaran berjalan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan 2022. Serta diharapkan adalah dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan

manajemen kepegawaian, maupun dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas kegiatan internal di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu dokumen perencanaan Itahunan yang merupakan penjabaran Renstra BKPSDM tahun 2016-2021.

Ruang lingkup Rencana Kerja meliputi :

Bab	I	PENDAHULUAN Pada Bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran umum Penyusunan rancangan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
Bab	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD pada tahun lalu (n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Bab	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Pada Bab ini menyajikan Telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , Program dan Kegiatan menguraikan mengenai Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, lokasi Kegiatan, kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber dana dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bab	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab	V	<p>Penutup</p> <p>Berisikan Uraian Penutup, berupa Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sed=andainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.</p>
-----	---	--

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu 2020 dan Capaian Renstra BKPSDM**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia Kabupaten Solok Selatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir, terdapat kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan, mencapai target yang telah ditetapkan, kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan, namun secara garis besar kendala tersebut dapat dihadapi dengan berbagai solusi yang ada sehingga kegiatan dapat dilaksanakan walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, berikut gambaran pencapaian target Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia secara kuantitatif yang disajikan dalam table 2.1 berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan
Pencapaian Renstra BKPSDM s/d 2020
Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4.05	Kepegawaian									
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diselesaikan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Pelayanan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi kantor	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur									
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah unit Peralatan kantor yang diadakan	33 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	Pengadaan Meubeuleir	Jumlah unit Meubeuler yang diadakan	32 Unit		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan yang diadakan	3 Unit		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor	3 Unit		-	-	-	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	10 Unit		7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pembangunan Gedung Kantor (Arsip Kepegawaian)	Jumlah unit pembangunan gedung kantor	1 Unit		-	-	-	-	-	-
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah unit mesin absen yang diadakan	40 Unit		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas ASN	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	250 Stel		-	-	-	-	-	-
4.05.4.05.01.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas ASN									
	Pengurusan SK Pensiun & Taspen	Jumlah SK pensiun dan Taspen yang diterbitkan	466 dok		90 dok	207 dok	97%	46 dok	46 dok	100%
	Diklat Pembekalan Purna Tugas	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pembekalan purna tugas	250 org		-	-	-	-	-	-
	Program Pendidikan									



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kedinasan									
	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah pengiriman peserta Diklat penjenjangan struktural (Kontribusi) dan jumlah peserta diklat penjenjangan struktural yang difasilitasi (Pola Fasilitasi)	400 Org		6 Org	-	0%	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat ke pamongpraja	15 org		2 org	-	0 %	-	-	-
	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah orang peserta diklat pola fasilitasi dan kontribusi	1320 org		-	-	-	-	-	-
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur									
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon ASN	Jumlah peserta diklat prajabatan pola fasilitasi dan	1000 org		200 org	199 org	99,9%	133 org	1 org	90 %



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Daerah	kontribusi								
	Penyelenggaraan ASN Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Wisuda	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas belajar, ijin belajar dan bantuan wisuda	100 org		120 org	145 org	121%	20 org	20 org	100%
4.05.4.05.01.31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
	Seleksi penerimaan CASN	Jumlah peserta pelaksanaan seleksi CPNS	26.000 org		5000 org	4140 Org	82,8%	2600 org	2600 org	100%
	Pemberian penghargaan pada ASN yang berprestasi	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan	515 org		83 org	148 org	174%	100 org	100 org	100%
	Pemberian Bantuan dan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Ikatan Dinas Lainnya	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang menerima bantuan	58 org		3 org	3 org	100%	3 org	3 org	100%
	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan ASN	Jumlah sidang Baperjakat yang dilaksanakan	25 kali		-	-	-	-	-	-



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengurusan Karis/Karsu dan Karpeg	Jumlah dokumen karis/karsu dan karpeg yang diterbitkan	1750 dok		255 dok	346 dok	136%	100 dok	100 dok	100%
	Penyelesaian Kasus-kasus ASN	Jumlah kasus-kasus ASN yang ditangani	135 Kasus		18 Kasus	18 Kasus	100%	8 Kasus	8 Kasus	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	1000 org		50 org	50 org	100%	66 org	66 Org	100%
	Pembekalan dan Pengambilan sumpah CASN/ASN	Jumlah ASN yang disumpah	1800 org		200 org	240	120%	200 org	200 org	100%
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi kenaikan pangkat	4800 org		800 org	870	109%	800 org	800 org	100%
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN peserta ujian dinas	400 org		-	-	-	130 org	130 org	100%
	Pembangunan/ Pengembangan SIMPEG	Jumlah dokumen ASN yang dikelola dalam	4.670 dok		4070 dok	4070 dok	100%	3441 dok	3441 Dok	100%



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Daerah	SIMPEG dan up to date								
	Penempatan ASN	Jumlah ASN yang di mutasi	1200		200 org	204 org	102%	200 org	200 org	100%
	Penyusunan rencana pembinaan karir ASN	Tersusunnya dokumen analis jabatan	1 dok		1 dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas	Jumlah pelaksanaan Seleksi dan Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas	19 kali		3 kali	6 Kali	200%	3 Kali	3 kali	100%
	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah jabatan Fungsional yang dibina			50 org	535 org	1068%	50 org	50 org	100%
	Penilaian Kompetensi Aparatur	Jumlah ASN yang dilakukan penilaian kompetensi/Aplikasi	800 org/1 aplikasi		30 org/1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	30 org	30 org	100%



RENJA BKPSDM 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2016 s.d. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja BKPSDM tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja BKPSDM 2019	Realisasi Renja BKPSDM 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Fasilitasi Kegiatan KORPRI Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kegiatan korpri	1 kali		1 kali	1 kali	100%	1 Kali	1 kali	100%
	Penegakan dan pengawasan Disiplin ASN	Persentase pelanggaran disiplin PNS	95%		12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah arsip kepegawaian yang terkelola	3.600 dok		-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi penunjang Kepegawaian di Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Untuk pengukuran pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok selatan telah menetapkan 6 indikator sebagai alat ukur pencapaian target, yaitu:

- Persentase eselonering yang telah mengikuti diklat struktural
- Persentase aparatur yang berijazah sarjana dan pasca sarjana
- Persentase penempatan aparatur yang sesuai bidang keahlian berdasarkan analisa jabatan
- Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin
- Persentase aparatur purna tugas yang diberikan pembekalan
- Jumlah penyelesaian SK pensiun dan taspen



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kabupaten Solok Selatan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase eselonering yang telah mengikuti diklat struktural	-	-									
	Eselon II			57 %	63 %	70 %	77 %	43,3 %	17 %	17 %	19 %	
	Eselon III			60 %	68 %	74 %	80 %	15,3 %	21 %	21 %	22 %	
	Eselon IV			45 %	55 %	65 %	75 %	18,3 %	22 %	22 %	25 %	
2.	Persentase aparatur yang berijazah sarjana dan pasca sarjana	-	-									
	S1			59 %	66 %	73 %	80 %	55,34 %	58 %	60 %	62 %	
	S2			5,74 %	7,16 %	8,58 %	10 %	4,55 %	4,6 %	5 %	5,5 %	
	S3			0,14 %	0,16%	0,18 %	0,20 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	
3.	Persentase penempatan aparatur yang sesuai bidang keahlian berdasarkan analisa jabatan	-	-	60 %	75 %	80 %	80%	50 %	88 %	70 %	75 %	
4.	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	-	-	90 %	90 %	90 %	90 %	155 %	90 %	90 %	95 %	
5.	Persentase aparatur purna tugas yang diberikan pembekalan	-	-	50 %	50 %	50 %	50 %	0 %	0 %	0 %	50 %	
6.	Jumlah penyelesaian SK pensiun dan taspen	-	-	90 Dok	90 Dok	90 Dok	90 Dok	136 Dok	207 Dok	100 Dok	120 Dok	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Dalam penyelenggaraan tupoksi OPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Solok Selatan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu- isu penting di bidang kepegawaian, berikut isu-isu tersebut antara lain:

1. Penyederhanaan birokrasi sesuai pidato Presiden Republik Indonesia.
2. Penerapan Sistem manajemen Kinerja sesuai amanat PP No. 30 Tahun 2019.
3. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur.
4. Nilai Sistem Merit.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian.
7. Penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur.

Selain isu-isu penting tersebut terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD sebagai berikut :

- Kendala-kendala :

1. Belum Optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian.
2. Masih rendahnya kompetensi SDM ASN.
3. Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada.
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan OPD yang dapat menunjang peningkatan pelayanan OPD.

- Peluang :

1. Perkembangan teknologi informasi bidang kepegawaian.
2. Aparatur sudah mengikuti perkembangan aturan-aturan kepegawaian.
3. Meningkatnya kedisiplinan pegawai melalui absensi elektronik dan penilaian kinerja yang berdampak terhadap penghasilan ASN.
4. Peningkatan kuantitas sumber daya aparatur melalui seleksi CPNS 2019.

- Kekuatan :

1. Semangat kerja ASN.
2. Loyalitas dan Dedikasi pegawai.
3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sudah mulai baik.
4. Pelaksanaan Sosialisasi Kepegawaian sudah dilaksanakan.
5. Penataan manajemen pelayanan OPD.

- Kelemahan :
 1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
 2. Jarak tempuh koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BKN regional yang relatif jauh.
 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelayanan kepegawaian.
 4. Masih kurangnya inovasi-inovasi pegawai dalam bekerja.
 5. Masih rendahnya tingkat kesadaran pegawai akan tingkat pencapaian kinerja.
 6. Minimnya pengetahuan pegawai tentang perencanaan dan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Tantangan :
 1. Belum optimalnya OPD dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan.
 2. Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian.
 3. Penempatan aparatur birokrasi yang sesuai dengan kompetensi masih rendah.
 4. Pengaruh politik terhadap kebijakan-kebijakan kepegawaian.
 5. Belum jelasnya pola karir ASN.

Berdasarkan isu-isu penting, kendala, peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Solok Selatan menentukan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Peningkatan nilai penerapan Sistem Merit.
3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis teknologi informasi agar dapat diakses dengan mudah.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana.
5. Peningkatan Kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan serta kualitas pelayanan OPD.
6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi.
7. Menyusun pola karir ASN agar jelas dan terarah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 dan Renstra OPD 2016-2021, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengajukan 6 program yang terdiri dari 33 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan :



Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : BKPSDM

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					548.380.180,00	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					548.380.180,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Solsel	Jumlah surat masuk dan keluar yang diselesaikan	12	Bulan	9.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Solsel	Jumlah surat masuk dan keluar yang diselesaikan	12	Bulan	9.800.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Solsel	Tersedianya Pelayanan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12	Bulan	21.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Solsel	Tersedianya Pelayanan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12	Bulan	21.000.000	
	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional	Solsel	Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional	12	Bulan	7.800.000	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional	Solsel	Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional	12	Bulan	7.800.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Solsel	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	144.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Solsel	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	144.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Solsel	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	30.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Solsel	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	30.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Solsel	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	28.000.000	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Solsel	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	28.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Solsel	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	Bulan	4.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik	Solsel	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	Bulan	4.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan makanan dan minuman	Solsel	Tersedianya makanan dan minuman	12	Bulan	13.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Solsel	Tersedianya makanan dan minuman	12	Bulan	13.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Solsel	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	12	Bulan	250.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Solsel	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	12	Bulan	250.000.000	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor	Solsel	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi kantor	12	Bulan	63.600.000	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor	Solsel	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi kantor	12	Bulan	63.600.000	
	Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	Solsel	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	12	Bulan	5.000.000	Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	Solsel	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	12	Bulan	5.000.000	
	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan Prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik			100.000.000	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan Prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik			100.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Solsel	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	15.000.000	Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor	Solsel	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	15.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Solsel	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	12	Bulan	75.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Solsel	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	12	Bulan	75.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Solsel	Terpenuhi nya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpenuhi nya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	32.000.000	
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.076.731.000	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.076.731.000	
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNSD	Solsel	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNSD	133	orang	1.000.000.000	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNSD	Solsel	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNSD	133	orang	1.000.000.000	
	Penyelenggaraan ASN Tugas Belajar,Izin Belajar dan Bantuan Wisuda	Solsel	Terlaksananya Penyelenggaraan ASN Tugas Belajar,Izin Belajar dan Bantuan Wisuda	100	Orang	76.731.000	Penyelenggaraan ASN Tugas Belajar,Izin Belajar dan Bantuan Wisuda	Solsel	Terlaksananya Penyelenggaraan ASN Tugas Belajar,Izin Belajar dan Bantuan Wisuda	100	Orang	76.731.000	
	4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas					30.000.000	4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas					30.000.000	
	Pengurusan SK Pensiun & Taspen	Solsel	Terbitnya SK Pensiun & Taspen	248	Orang	30.000.000	Pengurusan SK Pensiun & Taspen	Solsel	Terbitnya SK Pensiun & Taspen	248	Orang	30.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					1.904.935.200	5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1				1.904.935.200	
	Seleksi penerimaan CASN	Solsel	Terlaksananya seleksi CPNS Menggunakan Computer Assisted Test (CAT)	5.000	orang	950.000.000	Seleksi penerimaan CASN	Solse	Terlaksananya seleksi CPNS Menggunakan Computer Assisted Test (CAT)	5.000	orang	950.000.000	
	Pemberian penghargaan pada ASN yang berprestasi	Solsel	Terlaksananya Pemberian penghargaan pada ASN (Prestasi dan Pengabdian- Satya Lencana Karya Satya)	200	Orang	20.000.000	Pemberian penghargaan pada ASN yang berprestasi	Solsel	Terlaksananya Pemberian penghargaan pada ASN (Prestasi dan Pengabdian- Satya Lencana Karya Satya)	200	Orang	20.000.000	
	Pengurusan Karis/Karsu dan Karpeg	Solsel	Terbitnya Karis/Karsu dan Karpeg	500	Orang	40.000.000	Pengurusan Karis/Karsu dan Karpeg	Solsel	Terbitnya Karis/Karsu dan Karpeg	500	Orang	40.000.000	
	Pembekalan dan Pengambilan Sumpah CASN/ASN	Solsel	Terlaksananya Pembekalan dan Pengambilan Sumpah CASN/ASN	150	Orang	15.000.000	Pembekalan dan Pengambilan Sumpah CASN/ASN	Solsel	Terlaksananya Pembekalan dan Pengambilan Sumpah CASN/ASN	150	Orang	15.000.000	
	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Solsel	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Kepegawaian	3.573	Dokumen	25.000.000	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Solsel	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Kepegawaian	3.573	Dokumen	25.000.000	
	Pembangunan/ Pengembangan SIMPEG Daerah	Solsel	Terlaksananya Pengelolan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ASN (e-TPP dan e-Kinerja)	3.573	dokumen	75.000.000	Pembangunan/ Pengembangan SIMPEG Daerah	Solsel	Terlaksananya Pengelolan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ASN (e-TPP dan e-Kinerja)	3.573	dokumen	75.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengawasan Disiplin PNS	Solsel	Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan disiplin ASN (perbup 20 th 2015,Perbup 29 th 2016 dan Perbup 41 th 2017)	95	Persen	75.000.000	Pengawasan Disiplin PNS	Solsel	Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan disiplin ASN (perbup 20 th 2015,Perbup 29 th 2016 dan Perbup 41 th 2017)	95	Persen	75.000.000	
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Solsel	Terfasilitasinya kenaikan pangkat ASN	800	orang	85.600.000	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Solsel	Terfasilitasinya kenaikan pangkat ASN	800	orang	85.600.000	
	Pembinaan Jabatan Fungsional	Solsel	Jumlah jabatan Fungsional yang dibina	25	Orang	50.529.600	Pembinaan Jabatan Fungsional	Solsel	Jumlah jabatan Fungsional yang dibina	25	Orang	50.529.600	
	Fasilitasi Kegiatan KORPRI Kabupaten Solok Selatan	Solsel	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan KORPRI Kabupaten Solok Selatan	1	Tahun	20.000.000	Fasilitasi Kegiatan KORPRI Kabupaten Solok Selatan	Solsel	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan KORPRI Kabupaten Solok Selatan	1	Tahun	20.000.000	
	Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas	Solsel	Terlaksananya seleksi dan Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas dan jabatan Fungsional	3	Kali	237.976.000	Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas	Solsel	Terlaksananya seleksi dan Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas dan jabatan Fungsional	3	Kali	237.976.000	
	Penyelesaian Kasus-kasus ASN	Solsel	Persentase Kasus-kasus ASN yang Ditangani	20	Kasus	50.000.000	Penyelesaian Kasus-kasus ASN	Solsel	Persentase Kasus-kasus ASN yang Ditangani	20	Kasus	50.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	Solsel	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	50	orang	30.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	Solsel	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	50	orang	30.000.000	
	Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah	Solsel	Terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian	140	Orang	35.000.000	Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah	Solsel	Terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I dan II,	140	Orang	35.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ijazah						Ujian Penyesuaian Ijazah				
	Penyusunan rencana pembinaan karir ASN	Solsel	Tersusunnya Analisis dan Pemetaan Jabatan	1	dokumen	30.000.000	Penyusunan rencana pembinaan karir ASN	Solsel	Tersusunnya Analisis dan Pemetaan Jabatan	1	dokumen	30.000.000	
	Penilaian Kompetensi Aparatur	Solsel	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Aparatur	60	orang	165.829.600	Penilaian Kompetensi Aparatur	Solsel	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Aparatur	60	orang	165.829.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jarring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan.

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Merupakan OPD pelaksana fungsi Penunjang Kepegawaian, oleh karena itu sesuai dengan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia **tidak mengakomodir usulan masyarakat**.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Nihil				

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM****3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional****a. Kebijakan Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)**

Perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan harus mempedomani dan merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta harus terjadi sinkronisasi program dan kegiatan secara berkesinambungan antara pengelola ASN (Menpan RB, BKN, LAN, BKD Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota) agar sasaran dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan dan tujuan Negara Indonesia yang salah satunya adalah Good Government dan Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara merupakan bagian terpenting dalam Sistem Penyelenggaraan Negara, dalam penyelenggaraan Negara ada 3 (tiga) bagian yang menjadi unsur Utama yaitu Sistem Pengelolaan Negara (Manajemen), Aparatur dan rakyat, untuk itu kualitas dan kuantitas aparatur sangat menentukan perkembangan Negara.

Beberapa kebijakan Nasional tentang Pengembangan kualitas/komptensi ASN yaitu :

- 1) UU ASN telah menetapkan jenis kompetensi yang harus dikuasai ASN yaitu kompetensi Manajerial, teknis dan social kultural
- 2) Perencanaan dan jaminan setiap ASN mendapat HAK untuk mengembangkan kompetensi setiap tahun dalam rangka pengembangan kariernya
- 3) Variasi setiap jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan

Berikut tantangan Nasional pengelolaan ASN :

- 1) Target mewujudkan ASN Professional bagi birokrasi berkelas dunia
- 2) Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN (Basis Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja)
- 3) Sinergi antara pengelolaan ASN
- 4) Penguatan unit pengelolaan ASN

Setiap unit Pengelolaan ASN harus memiliki kesamaan VISI untuk mewujudkan kebijakan dan target yang telah ditetapkan guna menghadapi tantangan Nasional Pengelolaan ASN, berikut VISI dan MISI Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia :

Visi

Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi

Misi

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Dari Visi dan Misi diatas, sebagai Leading Sektor unit Pengelolaan ASN, Menpan RB menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategi tahun 2015-2019 yaitu :

Tujuan Strategis Menpan RB 2015-2019 :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas.
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

5 Sasaran Kementerian PANRB 2015 - 2019

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua K/L/ provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang “Baik”, yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga Pemerintah. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara transparan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem

integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM .

4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator semakin banyaknya IP yang inovasinya mendapatkan pengakuan secara internasional. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan publik secara nasional.
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan pencapaian sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif dan efisien, Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta sasaran Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas. Pencapaian sasaran Kementerian PANRB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran yang ketiga, Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB

b. Telaahan Renstra BKN

Komitmen BKN untuk membangun sistem manajemen PNS dituangkan dalam visi BKN dalam renstra 2015-2019, yaitu :

“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.

Penentuan visi tersebut didasarkan pada landasan yuridis dan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan nasional. Landasan yuridis yang dimaksud adalah Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999:

1. Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
2. Pasal 3 ayat (2) dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pasal 7 ayat (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya
4. Pasal 7 ayat (2) gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
5. Pasal 12 ayat (2) Pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja (dalam rangka merit system).
6. Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
7. Pasal 3 ayat (2) dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Pasal 7 ayat (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya
9. Pasal 7 ayat (2) gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
10. Pasal 12 ayat (2) Pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem

prestasi kerja (dalam rangka merit system).

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Profesionalisme, Netralitas, dan Kesejahteraan Pegawai harus diwujudkan melalui berbagai upaya oleh pemerintah. BKN sebagai Lembaga Pemerintah penyelenggara manajemen kepegawaian (Pasal 34 ayat (2)), berkewajiban untuk mengambil langkah upaya sesuai dengan bidang tugasnya mengemban amanat peraturan perundang-undangan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, keberadaan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera, menjadi perhatian utama BKN dalam upaya perwujudannya melalui pembangunan sistem manajemen kepegawaian berjangka panjang (Tahun 2010-2025).

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang mengacu kepada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada BKN. Misi BKN dalam Renstra 2015- 2019 adalah:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian Untuk mewujudkan kepuasan atas pelayanan bidang kepegawaian diwujudkan melalui program dan kegiatan pelayanan prima kepegawaian dari hulu ke hilir. Hal ini dilakukan dengan tujuan penciptaan sistem dan mekanisme kerja yang terintegrasi untuk mewujudkan profesionalitas pelayanan kepegawaian.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN, sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian adalah perwujudan salah satu tugas BKN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen kepegawaian ASN. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian diatur melalui seperangkat mekanisme kerja dan personil fungsional auditor kepegawaian untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN di instansi-instansi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai Misi ini

diwujudkan dengan ketersediaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam implementasi manajemen kepegawaian ASN untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan dan pemenuhan kesejahteraan

4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian Sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai seperangkat peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan secara efisien, efektif dan akurat. Sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut merupakan rangkaian data yang memuat informasi kepegawaian ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi yang berbasis teknologi
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN Sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai seperangkat peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan secara efisien, efektif dan akurat. Sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut merupakan rangkaian data yang memuat informasi kepegawaian ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi yang berbasis teknologi
6. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalitas pegawai BKN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKN. Tujuan BKN dalam Renstra 2015-2019 adalah:

1. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara Nasional Terwujudnya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya efektivitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian, sistem pembinaan kinerja yang optimal, kualitas rumusan perundang-undanga kepegawaian dan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Indikator

meningkatnya perbaikan manajemen kepegawaian dilihat dari semakin membaiknya indeks profesionalitas ASN.

2. Mewujudkan pelayanan prima dibidang kepegawaian Terwujudnya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan kepegawaian dengan menggunakan metode pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai
3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien, dan akuntabel

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, dan pengelolaan administrasi, penyediaan layanan informasi serta pemenuhan standar mutu sarana prasarana kantor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. dengan ditetapkannya tujuan akan mempertajam fokus pelaksanaan misi yang menggambarkan isu-isu strategik yang ingin dicapai oleh seluruh unsur organisasi dan akan mendorong mensinergikan antar bidang.

Untuk itu disusunlah tujuan BKPSDM Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

- Terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang terencana dan terarah
- Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kepegawaian dalam pembangunan daerah yang handal dan terampil
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program Kepegawaian
- Terselenggaranya pelayanan teknis dalam bidang Kepegawaian yang berorientasi kepada kualitas Pegawai Negeri sipil

- Meningkatnya partisipasi PNS dalam pembangunan dengan pola peran serta aktif
- Tersedianya data-data kepegawaian sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah
- Tersedianya sistem dan informasi data pegawai dalam pembangunan daerah

b. Sasaran**Tujuan – 1 :****Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Tersedianya SDM aparatur Pegawai Negeri Sipil sesuai kualifikasi dan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">- Dilaksanakannya Diklat/Pelatihan bagi personil- Dilaksanakannya pengadaan personil

Tujuan – 2 :**Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Pegawai Negeri Sipil**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">- Dilaksanakannya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai- Dilaksanakannya pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia

Tujuan – 3 :**Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Aparatur Pegawai Negeri Sipil dalam Pembangunan Daerah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya prosentase realisasi pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan- Tersedianya data dan informasi realisasi dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan- Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan

	pembangunan daerah dan lintas sektoral
--	--

Tujuan – 4 :**Terselenggaranya Pelayanan Kepegawaian dalam Pembangunan Daerah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis di bidang kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">- Dilaksanakannya pelayanan tepat waktu dan tepat sasaran- Terpenuhinya semua kebutuhan pelayanan kepada unit kerja dalam bidang kepegawaian

Tujuan – 5 :**Meningkatnya Partisipasi Aktif Aparat Pegawai Negeri Sipil**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terlaksananya Pegawai Negeri Sipil yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik	<ul style="list-style-type: none">- Terwujudnya partisipasi Aparat Pegawai Negeri Sipil

Tujuan – 6 :**Tersedianya Data Hasil Pengkajian dan Penelitian Masalah Kepegawaian**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Tersedianya data masalah kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">- Terangkumnya data pengkajian yang mendetail tentang masalah kepegawaian sebagai pendukung pengambilan kebijakan dalam pembangunan

Tujuan – 7 :**Tersedianya sistem dan informasi data tentang pegawai**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Tersedianya sistem dan informasi data pegawai	<ul style="list-style-type: none">- Terselenggaranya penerapan sistem dan informasi data pegawai

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program yang diusulkan pada tahun 2021 meliputi 5 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rencana kegiatan yang diusulkan pada tahun 2021 merupakan penjabaran dari 5 program dan 33 Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor
 - k. Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNSD
 - b. Penyelenggaraan ASN tugas belajar, izin belajar dan bantuan wisuda
4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

- a. Pengurusan SK Pensiun dan Taspen
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - b. Pemberian Penghargaan pada ASN yang berprestasi
 - c. Pengurusan Karis/Karsu dan Karpeg
 - d. Pembekalan dan pengambilan sumpah CPNS/ASN
 - e. Pengelolaan Arsip Kepegawaian
 - f. Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Daerah
 - g. Pengawasan disiplin PNS
 - h. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN
 - i. Pembinaan Jabatan Fungsional
 - j. Fasilitasi kegiatan KORPRI Kabupaten Solok Selatan
 - k. Pelantikan JPT, Administrastor dan Pegawai
 - l. Penyelesaian kasus-kasus ASN
 - m. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
 - n. Ujian Dinas dan penyesuaian ijazah
 - o. Penyusunan rencana pembinaan karir ASN
 - p. Penilaian Kompetensi Aparatur

Lokasi Program dan kegiatan

5 program dan 33 kegiatan pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 bersumber dari dana APBD Murni, dengan rencana plafon anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD kabupaten Solok Selatan Tahun 2022. Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2022 akan disajikan dalam tabel dibawah ini :



TABEL T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

Lembar 1 dari 6

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana			
						Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)			APBD	APBD Prov.	APBN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	03				KEPEGAWAIAN								
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					468.957.416	-	-	-
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000	-	-	-
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengerti akan Peraturan Perundang - Undangan Kepegawaian	BKPSDM	1 Kegiatan	30.000.000			RPJMD
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					306.203.166	-	-	-
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Penerangan dan instalasi	BKPSDM	12 Bulan	3.998.766			RPJMD
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kinerja	BKPSDM	12 Bulan	20.896.000			RPJMD



RENJA BKPSDM 2022

5	03	01	2.06	03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlatan Rumah Tangga	Meningkatnya Kinerja	BKPSDM	12 Bulan	4.999.400			RPJMD		5.000.000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	Meningkatnya Kinerja	BKPSDM	12 Bulan	15.000.000			RPJMD		18.000.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi oleh PNS dan Non PNS	BKPSDM	12 Bulan	261.309.000			RPJMD		270.000.000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					34.960.000	-	-	-	-	34.960.000
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Materai	Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Matrai 10.000 (Matrai 3.000 dan Matrai 6.000)	4.000.000			RPJMD	Matrai 10.000 (Matrai 3.000 dan Matrai 6.000)	4.000.000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Rekening Air, Listrik dan Speedy/internet	BKPSDM	12 Bulan	21.000.000			RPJMD	12 Bulan	21.000.000
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Perbaikan/service, install ulang, suku cadang	BKPSDM	12 Bulan	9.960.000			RPJMD	12 Bulan	9.960.000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					97.794.250	-	-	-	-	110.000.000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kendaraan Dinas yang Siap Pakai	BKPSDM	8 Unit	82.794.250			RPJMD	8 Unit	90.000.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Suasana Bekerja yang nyaman Meningkatnya Kinerja	BKPSDM	1 Unit	15.000.000			RPJMD	1 Unit	20.000.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.762.166.000	-	-	-	-	1.938.382.600
5	03	02	2.01		Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					893.500.000	-	-	-	-	982.850.000



RENJA BKPSDM 2022

5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya pelaksanaan Pengrekrutan ASN dan PPPK	Terpenuhinya kebutuhan PNS dan terisi formasi jabatan pada SOTK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	BKPSDM	6000 pelamar dan 3 Orang STTD	665.500.000			RPJMD	5.500	732.050.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Pengambilan Sumpah ASN	Terwujudnya PNS yang melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan dan sadar akan tanggungjawabnya	BKPSDM	150 Orang	10.000.000			RPJMD	300	11.000.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi ASN yang Akan Pensiun Maupun yang Akan Pensiun	Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian dan terpenuhinya hak-hak Pegawai	BKPSDM	250 pensiun	40.000.000			RPJMD		44.000.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			BKPSDM		20.000.000			RPJMD		22.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Informasi Data Kepegawaian	Terpenuhinya Kebutuhan Sistem Informasi ASN yang terintegrasi dan mudah diakses.	BKPSDM	3478 Dokumen	93.000.000			RPJMD		102.300.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Arsip PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Solok Selatan tertata dengan baik dan rapi, serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan porsinya. Dapat terbitnya Kartu Istri/Kartu Suami dan Kartu Pegawai bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	BKPSDM	3478 Dokumen	65.000.000			RPJMD		71.500.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					346.155.000	-	-	-	-	380.770.500



RENJA BKPSDM 2022

5	03	02	2.02	02	Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	Terkelolanya Kenaikan Pangkat PNS secara baik dan profesional.	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas tingkat I dan II serta ujian penyesuaian ijazah	BKPSDM	800 SK	135.600.000			RPJMD	800 SK	149.160.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Lelang Jabatan bagi JPT Tersedianya Regulasi Manajemen Karier PNS	Penilaian Kompetensi Aparatur ini adalah terlaksananya seleksi terbuka terhadap 7 Jabatan Pimpinan Tinggi dan Tersedian Regulasi Manajemen Karier PNS pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.	BKPSDM	800 SK dan 120 orang yang mengikuti ujian dinas	210.555.000			RPJMD	800 SK dan 120 orang yang mengikuti ujian dinas	231.610.500
															-
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN					246.681.500	-	-	-	-	271.349.650
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assesment Center	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pejabat Pengawas.	Penilaian Kompetensi Aparatur ini adalah terlaksananya Assesment terhadap 250 Pejabat Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.	BKPSDM	250	119.421.000			RPJMD		131.363.100
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Penilaian Kinerja terhadap semua Pegawai.	Terlaksananya Penilaian Kinerja terhadap 3573 Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.	BKPSDM	3573	76.731.000			RPJMD		84.404.100
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah SK Jabatan fungsional yang diterbitkan melalui mekanisme perpindahan jabatan	Jumlah Pejabat fungsional yang di Angkat, dilantik dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	BKPSDM	151 SK	50.529.500			RPJMD		55.582.450
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					275.829.500	-	-	-	-	303.412.450



RENJA BKPSDM 2022

5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian Kinerja terhadap semua Pegawai.	Terlaksananya Penilaian Kinerja terhadap 3573 Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.	BKPSDM	3573 oarng	76.329.500			RPJMD		83.962.450
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diberi penghargaan (Prestasi dan Pengabdian –Satya Lancana Karya Satya.	Terwujudnya pemberian reward pegawai berprestasi untuk memotivasi kinerja PNS	BKPSDM	200 orang	25.000.000			RPJMD		27.500.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksannaya Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Menurunnya persentase tingkat pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	95 Persen	108.000.000			RPJMD		118.800.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya sidang penyelesaian kasus kepegawaian bagi pelanggaran disiplin PNS dan terselesaikannya keputusan pemberian atau penolakan izin perkawinan dan perceraian PNS.	BKPSDM		66.500.000			RPJMD		73.150.000
															-
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					30.000.000	-	-	-	-	33.000.000
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					30.000.000	-	-	-	-	33.000.000
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang , dan Urusan Pemerintahan Umum'	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	Terlaksananya Diklat fungsional dan Persentase PNS dengan kompetensi tinggi	BKPSDM		30.000.000			RPJMD		33.000.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS					1.479.600.000	-	-	RPJMD	7 OPD lelang, 134 CPNS yang mengikuti LPJ, 2 orang	1.627.560.000



														Diklat PIM II dan 2 Oranga Diklat Pim TK III	
4	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.479.600.000	-	-	RPJMD	7 OPD lelang, 134 CPNS yang mengikuti LPJ, 2 orang Diklat PIM II dan 2 Oranga Diklat Pim TK III	1.627.560.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, kelembangaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.479.600.000	-	-	RPJMD	7 OPD lelang, 134 CPNS yang mengikuti LPJ, 2 orang Diklat PIM II dan 2 Oranga Diklat Pim TK III	1.627.560.000
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terlaksananya Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dan Persentase PNS dengan kompetensi tinggi	1. Persentase jumlah CPNSD yang Gol II dan III yang mengikuti Latsar 2. Persentase JPT yang mengikuti PKN Tk.II	BKPSDM	7 OPD lelang, 134 CPNS yang mengikuti LPJ, 2 orang Diklat PIM II dan 2 Oranga Diklat Pim TK III	1.479.600.000			RPJMD	7 OPD lelang, 134 CPNS yang mengikuti LPJ, 2 orang Diklat PIM II dan 2 Oranga Diklat Pim TK III	1.627.560.000
										3.740.723.416	-	-	-	-	4.092.902.600

BAB V

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar BKPSDM Kabupaten Solok Selatan memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan Program BKPSDM Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Awal Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan Program Kegiatan ke Dalam KUA, PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi yang akan dijadikan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 sebagai wujud dari pencapaian kinerja Satuan Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Dikarenakan Rancangan awal Rencana Kerja ini masih bersifat indikatif sehingga diperlukan penyempurnaan, Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen Rancangan Awal Renja ini sehingga menjadi Rencana Kerja (Renja). Lebih lanjut kami berharap dokumen ini diharapkan dapat dijadikan gambaran awal rencana program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022.

Padang Aro, Maret 2022
**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**



Irwandi Osmadi, SE
NIP.196709191990031006

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05 - 4.5.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				548.380.180,00				626.200.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 tahun	4.000.000,00	APBD MURNI		1 Tahun	9.800.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12 Bulan	21.000.000,00	APBD MURNI		12 Bulan	21.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / Operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7 Unit	7.800.000,00	APBD MURNI		7 Unit	7.800.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12 Bulan	144.000.000,00	APBD MURNI		12 Bulan	144.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	20.980.180,00	APBD MURNI	.	1 Tahun	30.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	15.000.000,00	APBD MURNI	.	1 Tahun	28.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	4.000.000,00	APBD MURNI		1 Tahun	4.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 tahun	13.000.000,00	APBD MURNI		1 Tahun	13.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05 - 4.5.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	250.000.000,00	APBD MURNI	.	1 Tahun	300.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor *)	Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7 Orang	63.600.000,00	APBD MURNI		7 orang	63.600.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih *)	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	5.000.000,00	APBD MURNI		1 Tahun	5.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100.000.000,00				132.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	15.000.000,00	APBD MURNI	.	1 Tahun	20.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7 Unit	75.000.000,00	APBD MURNI	.	7 Unit	100.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	10.000.000,00	APBD MURNI	.	1 Tahun	12.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.326.731.000,00				1.482.231.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.5	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD *)	Persentase jumlah CPNSD Gol II dan III mengikuti Pelatihan Dasar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	133 Orang	1.250.000.000,00	APBD MURNI	.	133 Orang	1.295.500.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.25	Penyelenggaraan ASN Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Wisuda *)	Persentase PNS yang diberikan bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 Orang	76.731.000,00	APBD MURNI	.	150 Orang	186.731.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 16	Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas	Jumlah penyelesaian SK pensiun dan taspen persentase aparatur purna tugas yang diberikan pembekalan		98,00 SK 100,00 Persen	30.000.000,00				90.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 16.1	Pengurusan SK Pensiun dan Taspen	Terpenuhinya hak dan terlengkapi Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	248 Orang	30.000.000,00	APBD MURNI	.	248 Orang	90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase eselonering yang telah mengikuti Diklat Struktural Eselon III	21,00 Persen						
		Persentase eselonering yang telah mengikuti Diklat Struktural Eselon IV	22,00 Persen						
4.05 - 4.5.0101 – 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai bidang keahlian berdasarkan analisa jabatan	80,00 Persen		1.654.935.200,00		2.723.105.600,00		
		Persentase penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin	95,00 Persen						
4.05 - 4.5.0101 - 31.1	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) *)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi CASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000 Orang	685.000.000,00	APBD MURNI		1 Tahun	950.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.2	Pemberian Penghargaan pada ASN yang Berprestasi *)	Jumlah PNS yang Menerima Satya Lencana dan Reward	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200 Orang	20.000.000,00	APBD MURNI	.	200 Orang	50.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.8	Pengurusan Karis/Karsu dan Karpeg *)	Jumlah PNS yang difasilitasi pengurusan Karis/Karsu dan Karpeg	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500 Orang	40.000.000,00	APBD MURNI	.	500 Orang	80.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.10	Pembekalan dan Pengambilan Sumpah CASN/ASN *)	Jumlah CASN dan ASN yang diambil sumpah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150 Orang	15.000.000,00	APBD MURNI	.	150 orang	30.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.11	Pengelolaan Arsip Kepegawaian *)	Jumlah Arsip Kepegawaian PNS yang Dikelola	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.573 Dokumen	25.000.000,00	APBD MURNI	.	3.770 Dokumen	60.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.12	Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Daerah *)	Jumlah Data ASN yang akurat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.573 Dokumen	75.000.000,00	APBD MURNI	.	3.770 Dokumen	100.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.13	Pengawasan Disiplin PNS *)	ASN yang tidak melanggar Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95 Persen	75.000.000,00	APBD MURNI	.	95 Persen	200.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.14	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN *)	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pelayanan kepangkatan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	800 Orang	100.600.000,00	APBD MURNI	.	800 Orang	185.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05 - 4.5.0101 - 31.15	Pembinaan Jabatan Fungsional *)	Jumlah pejabat pengawas yang dikonversi menjadi Pejabat Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25 Orang	50.529.600,00	APBD MURNI	.	50 Orang	101.529.600,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.16	Fasilitasi kegiatan KORPRI kabupaten Solok Selatan*)	Jumlah Kegiatan dalam peringatan Hari KORPRI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	20.000.000,00	APBD MURNI	.	1 Tahun	50.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.19	Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas*)	Jumlah Pelantikan Pejabat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3 kali	237.976.000,00	APBD MURNI	.	3 kali	430.976.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.23	Penyelesaian Kasus - kasus ASN *)	jumlah kasus ASN yang ditangani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20 Kasus	50.000.000,00	APBD MURNI	.	20 Kasus	100.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.24	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Kepegawaian *)	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50 Orang	30.000.000,00	APBD MURNI	.	50 Orang	5.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.25	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah *)	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	140 Orang	35.000.000,00	APBD MURNI	.	150 Orang	80.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.27	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN *)	Tersusunnya pemetaan jabatan PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD MURNI	.	1 Dokumen	50.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 31.28	Penilaian Kompetensi Aparatur *)	Jumlah pejabat pengawas yang dinilai kompetensinya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30 Orang	165.829.600,00	APBD MURNI	.	60 Orang	250.000.000,00
		Persentase PNS yang dinilai kinerjanya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 Persen				1 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah				3.660.046.380,00				5.053.536.600,00